

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Andy Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991.

Aryadi, Gregorius, *Putusan Hakim dalam Perkara Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1995.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group*, Jakarta 2008.

-----, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2006.

-----, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Undip, Semarang, 2009.

-----, *Mediasi Penal - Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang , 2012.

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008.

Darwan prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perpektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.

Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009.

H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

*Handbook on Restorative Justice Programme*, United Nations, New York, 2006.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Machteld Boot, *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes*, Intersentia Antwerpen – Oxford – New York, 2001.

Malcolm N. Shaw, *International Law*, 5th Edition, Cambridge University Press, 2004.

Marc Ancel, *Social Defense A Modern Approach Problem*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965.

Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974.

M. Cherif Bassiouni, *Introduction To International Criminal Law*, Transnational Publisher, Inc. Ardsley, New York, 2003.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui APTB dan APKDH pada system peradilan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002.

-----, “*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1984.

-----, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

-----, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Philippa Webb, dalam Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Program Pasca Sarjana Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2007.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

-----, 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Rawls, John, *A Theorie of Justice*, Harvard University Press Cambridge, Massachusset, 1997.

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1985.

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. cet 3, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Steven R. Ratner dan Jason S. Abrams, *Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nurember Legacy*, Second Edition, Oxford University Press, 2001.

Sudarto, *Hukum Pidana 1A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991.

Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1998.

Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, 1995.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Perss) Jakarta, 2008.

-----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

-----, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.

UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna, UN New York, 2006.

Wirjono Prodjodjokro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta Bandung, 1981.

Yusuf, Muhammad, *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Instrumen perundang-undangan baik langsung maupun tidak langsung yang digunakan sebagai landasan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini adalah:

TAP MPR No. XI Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN;

UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap;

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK;

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003;

UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana;

UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan TPK;

UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### C. Sumber Lainnya

Dalam Resolusi “corruption in Government” (Hasil Kongres PBB ke-8 Tahun 1990) dinyatakan bahwa korupsi tidak hanya terkait dengan berbagai kegiatan “economic Crime”, tetapi juga dengan “Organized Crime”, illicit drug trafficking, money laundering, political crime, top hat crime, dan bahkan transnational crime.

Deby Chandra Arifin, 2018, kendala pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi transnasional, , *Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, Vol. 11 No.1.

Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Cet. 2.

Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008

Elwi Danil. (2001). “Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi; Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Disertasi. Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

“*How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement*,” *Harvardlawreview.org*, 8 juni 2018, <https://harvardlawreview.org/2018/06/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-asset-forfeiture-as-a-tool-of-criminal-law-enforcement/>, diunduh pada Sabtu 25 Januari 2020, pukul 20:00 Wib.

<https://www.jurnal.id/id/blog/2018-kenali-setiap-jenis-aset-yang-anda-miliki/>, diunduh pada Rabu 4 Maret 2020, pukul 08:00 Wib.

<https://ejournal3.undip.ac.id>, diunduh pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 20:00 WIB.

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN.pdf>, diunduh pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 21:00 WIB.

Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context* 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 367.

Mark Umbreit, *Family Group Conferencing : Implications For Crime Victims, The Center For Restorative Justice, University of Minnesota*,

Ndifon Neji and Felix Nyong, 2006, “Rethinking Civil Society Participation in the Implementation of the UN Convention Against Corruption in Nigeria”, *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol.9, No.16.

Saldi Isra, “*Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*”. Makalah. Disampaikan dalam Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham Prov. Jawa Tengah, tanggal 22 Mei 2008, di Semarang. Didownload dari [www.saldiisra.com](http://www.saldiisra.com), diunduh pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 20:00 WIB

Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Tesis Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.